



BAWASLU KOTA BATAM

*Laporan Keuangan
TA 2025 AUDITED*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Batam, 31 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja,

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, S.T.,M.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19761110 200803 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, S.T.,M.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19761110 200803 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Kota Batam Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.044.936.591,00 atau mencapai 97,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.076.088.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.270.123.608,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap sebesar Rp2.270.123.608,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.643.225,00 dan Rp2.258.480.383,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp657.290.908,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp657.290.908,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp657.290.908,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp657.290.908,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp657.290.908,00 dikurangi koreksi lain-lain sebesar Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.915.771.291,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.258.480.383,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BATAM

TAHUN 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	0,00	0%	0,00
Jumlah Pendapatan		-	0,00	0%	0,00
BELANJA					
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.1	16.764.000,00	5.447.000,00	32,49%	0,00
Belanja Barang	B.2	447.324.000,00	430.106.591,00	96,15%	0,00
Jumlah Belanja Operasional		464.088.000,00	435.553.591,00	93,85%	0,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.3	612.000.000,00	609.383.000,00	99,57%	0,00
Jumlah Belanja Modal		612.000.000,00	609.383.000,00	99,57%	0,00
JUMLAH BELANJA		1.076.088.000,00	1.044.936.591,00	97,11%	0,00

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	0,00
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.1	3.029.754.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.2	(759.630.392,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap		2.270.123.608,00	0,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-Lain		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		2.270.123.608,00	0,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3	11.643.225,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		11.643.225,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	2.258.480.383,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		2.258.480.383,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.270.123.608,00	0,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.1	12.084.083,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.2	64.242.573,00	0,00
Beban Pemeliharaan	D.3	50.246.944,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4	320.623.216,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.5	210.094.092,00	0,00
JUMLAH BEBAN		657.290.908,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(657.290.908,00)	0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

URAIAN	Ref	2025	2024
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.6	(657.290.908,00)	0,00
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(657.290.908,00)	0,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
LAPORAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(657.290.908,00)	(0,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.915.771.291,00	0,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	1.044.936.591,00	0,00
Diterima dari Entitas Lain		0,00	(0,00)
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.2	1.826.400.000,00	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		0,00	0,00
Transfer Masuk	E.4.3	44.434.700,00	0,00
Transfer Keluar		0,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.258.480.383,00)	(0,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	2.258.480.383,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Siste Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-148/KU.02/SJ/01/2026 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686115/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Penjelasan Visi:

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bawaslu Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan laporan kementerian yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Bawaslu Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan laporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Kota Batam. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau

kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (substance over form).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 4) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya

nilai residu.

- 5) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 6) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bawaslu Kota Batam telah mengadakan 2 (Dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan umum tahun 2025. Diantaranya penambahan pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar DIPA Awal dan DIPA Revisi Tahun 2025

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
0 (Awal)	02 Desember 2025	224.678.000,00	224.678.000,00	-
1 (DJA)	03 November 2025	224.678.000,00	1.076.088.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, Penambahan Belanja Modal, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
2 (KANWIL)	12 Desember 2025	1.076.088.000,00	1.076.088.000,00	Pemutakhiran data hasil revisi POK, Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA

B.1 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp98.214.359.293,00 atau 84,36 persen dari anggaran belanja sebesar Rp116.486.816.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	16.764.000,00	5.447.000,00	32,49
Belanja Barang (RM)	447.324.000,00	430.06.591,00	96,15
Belanja Modal	612.000.000,00	609.383.000,00	99,57
Total Belanja Kotor	1.076.088.000,00	1.044.936.591,00	97,11
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Bersih	1.076.088.000,00	1.044.936.591,00	97,11

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2025

Program	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Dukungan Manajemen	1.063.088.000,00	1.032.197.591,00	97,08
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	12.870.000,00	12.739.000,00	98,98
Total	1.076.088.000,00	1.044.936.591,00	97,11

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Pegawai	5.447.000,00	0	100
Belanja Barang	430.06.591,00	0	100
Belanja Modal	609.383.000,00	0	100
Total Belanja Kotor	1.044.936.591,00	0	100
Pengembalian	0	0	0
Jumlah	1.044.936.591,00	0	100

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp1.044.936.591,00 merupakan dari realisasi belanja sebesar Rp1.044.936.591,00.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya.

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Kota Batam sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.447.000,00 atau 32,49 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp16.764.000 ,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Lembur	16.764.000,00	5.447.000,00	32,49
Jumlah Belanja Kotor	16.764.000,00	5.447.000,00	32,49
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	
Total	16.764.000,00	5.447.000,00	32,49

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Lembur	5.447.000,00	0	100
Jumlah Belanja Kotor	5.447.000,00	0	100
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Total	5.447.000,00	0	100

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.447.000,00 dan Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100 persen dikarenakan Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.447.000,00 seluruhnya berasal dari APBN yang dipergunakan untuk Pembayaran uang lembur sebesar dan uang makan lembur PNS untuk bulan Desember 2025 sebanyak 7 Orang Pegawai.

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp430.106.591,00 atau 96,15 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp447.324.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	36.444.000,00	32.018.138,00	87,86
Belanja Barang Non Operasional	9.030.000,00	8.171.000,00	90,49
Belanja Jasa	27.500.000,00	19.550.000,00	97,43
Belanja Pemeliharaan	55.720.000,00	50.246.944,00	90,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	326.580.000,00	320.623.216,00	98,18
Jumlah Belanja Kotor	447.324.000,00	430.106.591,00	96,15
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	447.324.000,00	430.106.591,00	96,15

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp430.106.591,00 dan Rp0,00.

Tabel 8
Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	32.018.138,00	0	100
Belanja Barang Non Operasional	8.171.000,00	0	100
Belanja Jasa	19.550.000,00	0	100
Belanja Pemeliharaan	50.246.944,00	0	100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	320.623.216,00	0	100
Jumlah Belanja Kotor	430.106.591,00	0	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	430.106.591,00	0	100

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024, disebabkan karena Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya.

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp609.383.000,00 atau 99,57 persen dari anggaran belanja sebesar Rp612.000.000,00 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	612.000.000,00	609.383.000,00	99,57
Jumlah Belanja Kotor	612.000.000,00	609.383.000,00	99,57
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total	612.000.000,00	609.383.000,00	99,57

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp609.383.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.300.000,00	0	100
Jumlah Belanja Kotor	609.383.000,00	0	100

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total	609.383.000,00	0	100

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024 disebabkan karena Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya.

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp609.383.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.383.000,00	0	100
Jumlah Belanja Kotor	609.383.000,00	0	100
Pengembalian	-	-	-
Total	609.383.000,00	0	100

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp609.383.000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian :

Tabel 12
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lap Top Asus VivoBook	12 Unit	226.800.000,00
2	Lap Top Asus VivoBook	2 Unit	26.000.000,00
3	Camera Digital	1 Unit	58.000.000,00
4	View Board	1 Unit	170.000.000,00
5	Video Conference Aver	1 Unit	19.500.000,00
6	Sound System	1 Set	85.000.000,00
7	Printer	5 Unit	18.500.000,00
8	Lemari Besi	2 Unit	3.000.000,00
9	Mesin Finger Print	1 Unit	2.583.000,00
JUMLAH			609.383.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Peralatan Dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.029.754.000,00 dan Rp0,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Es	1	2.900.000,00
2	LCD Projector/Infocus	1	5.035.000,00
3	CCTV - Camera Control Television System	1	14.850.000,00
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	53.837.000,00
5	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2.676.000,00
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	25.020.000,00
7	Camera Digital	2	63.250.000,00
8	Lemari Besi/Metal	9	36.950.000,00
9	Sice	7	44.730.000,00
10	Lap Top	27	348.624.000,00
11	P.C Unit	10	62.469.000,00
12	Microphone/Wireless MIC	2	9.300.000,00
13	Alat Penghancur Kertas	1	5.900.000,00
14	Meja Resepsionis	1	4.900.000,00
15	Camera Conference	2	20.730.000,00
16	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	1.826.400.000,00
17	Meja Rapat	2	19.100.000,00
18	External/ Portable Hardisk	4	5.420.000,00
19	Lemari Kayu	19	29.750.000,00
20	Kursi Besi/Metal	29	46.300.000,00
21	A.C. Split	15	65.308.000,00
22	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	3.444.000,00
23	Sound System	2	89.478.000,00
24	Brandkas	1	4.900.000,00
25	Meja Kerja Kayu	25	55.950.000,00
26	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board	1	170.000.000,00
27	Tabung Pemadam Api	3	3.000.000,00
28	Mesin Absensi	2	9.533.000,00
JUMLAH		199	3.029.754.000,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	Rp	0,00
Mutasi tambah:		
- Pembelian		
- Transfer Masuk Hibah Pemda	Rp	609.383.000,00
- Transfer Masuk dari Provinsi	Rp	1.826.400.000,00
	Rp	593.971.000,00
Mutasi Kurang:		
- Transfer Keluar	Rp	173.000.000,00

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	3.029.754.000,00
Akumulasi		
Penyusutan per 31 Desember 2025	Rp	759.630.392,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	2.270.123.608,00

Penjelasan mutasi tambah dan Kurang yaitu :

- a. Pengadaan sebesar Rp609.383.000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian :

Tabel 14
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lap Top Asus VivoBook Core i7	12 Unit	226.800.000,00
2	Lap Top Asus VivoBook Core i5	2 Unit	26.000.000,00
3	Camera Digital	1 Unit	58.000.000,00
4	View Board	1 Unit	170.000.000,00
5	Video Conference Aver	1 Unit	19.500.000,00
6	Sound System	1 Set	85.000.000,00
7	Printer	5 Unit	18.500.000,00
8	Lemari Besi	2 Unit	3.000.000,00
9	Mesin Finger Print	1 Unit	2.583.000,00
JUMLAH		26	609.383.000,00

- b. Transfer masuk Hibah Barang dari Pemerintah Kota berupa Kendaraan Roda 4 sebanyak 6 Unit sebesar Rp1.826.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Tranfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6 Unit	1.826.400.000,00
JUMLAH		6 Unit	1.826.400.000,00

- c. Transfer masuk dari Bawaslu Provinsi sebesar Rp593.971.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Tranfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Es	1	2.900.000,00
2	LCD Projector/Infocus	1	5.035.000,00
3	CCTV - Camera Control Television System	1	14.850.000,00
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	35.337.000,00
5	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2.676.000,00
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	25.020.000,00
7	Camera Digital	1	5.250.000,00
8	Lemari Besi/Metal	7	3.395.000,00
9	Sice	7	44.730.000,00
10	Lap Top	13	95.824.000,00

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
11	P.C Unit	10	62.469.000,00
12	Microphone/Wireless MIC	2	9.300.000,00
13	Alat Penghancur Kertas	1	5.900.000,00
14	Meja Resepsionis	1	4.900.000,00
15	Camera Conference	1	1.230.000,00
16	Meja Rapat	2	19.100.000,00
17	External/ Portable Hardisk	4	5.420.000,00
18	Lemari Kayu	19	29.750.000,00
19	Kursi Besi/Metal	29	46.300.000,00
20	A.C. Split	15	65.308.000,00
21	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	3.444.000,00
22	Sound System	1	4.478.000,00
23	Brandkas	1	4.900.000,00
24	Meja Kerja Kayu	25	55.950.000,00
25	Tabung Pemadam Api	3	3.000.000,00
26	Mesin Absensi	1	6.950.000,00
JUMLAH		165	593.971.000,00

- d. Transfer Keluar merupakan TKTM dari Bawaslu Provinsi dan Kesalahan Pencatatan Klasifikasi Nama Barang sebesar Rp173.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Tranfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Besi/Metal	1 Unit	3.000.000,00
2	LCD Monitor	1 Unit	170.000.000,00
JUMLAH		2 Unit	173.000.000,00

C.2 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp759.630.392,00 dan Rp0,00.

Tabel 18
Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	759.630.392,00	0,00
Total		759.630.392,00	0,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 :

Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	3.029.754.000,00	759.630.392,00	2.270.123.608,00
Total		3.029.754.000,00	759.630.392,00	2.270.123.608,00

secara detail sebagaimana terlampir pada **Lampiran I**.

C.3 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp11.226.846,00 dan Rp0,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Tabel 20
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Utang kepada pihak ketiga	11.643.225,00	0	100
Total		11.643.225,00	0	100

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 senilai Rp11.643.225,00 merupakan Jurnal Akruwal Tunggakan Kekurangan Gaji PNS, Tagihan Listrik, Telepon dan Air bulan Desember Tahun 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal SPM
1	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik	522111	3.010.692,00
2	Pembayaran Belanja Tagihan Internet	522112	1.687.600,00
3	Pembayaran Belanja Tagihan Air	522113	307.850,00
Total			5.006.142,00

Tabel 22
Rincian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal SPM
1	Pembayaran Belanja Kekurangan Gaji Pokok PNS	511111	5.554.200,00
2	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Istri/Suami	511121	555.420,00
3	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Anak	511122	111.084,00
4	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Pajak	511125	416.137,00
5	Pembayaran Belanja Kekurangan Pembulatan	511119	242,00
Total			6.637.083,00

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.258.480.383,00 dan Rp0,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset senilai Rp2.270.123.608,00 dan kewajiban senilai Rp11.643.225,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 23
Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Ekuitas	2.258.480.383,00	0	100
Total		2.258.480.383,00	0	100

Terjadi kenaikan Ekuitas pada 31 Desember 2025 sebesar 100 persen dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2024 hal ini dikarenakan Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D. 1 Beban Pegawai**

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.084.083,00 dan Rp0,00.

Tabel 24
Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Kekurangan Gaji Pokok PNS	5.554.200,00	0	100
Belanja Kekurangan Tunj. Istri/Suami	555.420,00	0	100
Belanja Kekurangan Tunj. Anak	111.084,00	0	100
Belanja Kekurangan Tunj. Pph PNS	416.137,00	0	100
Belanja Kekurangan Pembulatan	242,00	0	100
Belanja Lembur	5.447.000,00	0	100
Jumlah Belanja Kotor	12.084.083,00	0	100
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Total	12.084.083,00	0	100

Pada Tahun 2025 Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan tahun 2024 dikarenakan Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya, berikut penjelasan Rincian Beban Pegawai :

1. Adanya pembayaran Kekurangan Gaji a.n Esther Irianti Lombogia, S.T, M.E dari bulan Juli 2025 s/d Desember 2025;
2. Adanya pembayaran Uang Lembur PNS Bulan Desember 2025.

Beban pegawai per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Beban Gaji Pokok PNS	Rp	5.554.200,00
- Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp	555.420,00
- Beban Tunj. Anak	Rp	111.084,00
- Belanja Kekurangan Tunj. Pph PNS	Rp	416.379,00
- Belanja Kekurangan Pembulatan	Rp	242,00
- Belanja Uang Lembur	Rp	5.447.000,00

Jumlah Mutasi Tambah	Rp	12.084.083,00
Mutasi Kurang:		
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025	Rp	12.084.083,00

Terdapat selisih beban pegawai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp6.637.325,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25
Rincian Selisih Beban Pegawai per 31 Desember 2025

No	Akun	Uraian	Nominal
1	511111	Belanja Kekurangan Gaji Pokok PNS	5.554.200,00
2	511121	Belanja Kekurangan Tunj.Istri/Suami	555.420,00
3	511122	Belanja Kekurangan Tunj. Anak	111.084,00
4	511125	Belanja Kekurangan Tunj. Pph PNS	416.379,00
5	511119	Belanja Kekurangan Pembulatan	242,00
	Total		6.637.325,00

D. 2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp64.242.573,00 dan R0,00.

Tabel 26
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	33.705.738,00	0	100
Beban Bahan	8.171.000,00	0	100
Beban Langganan Listrik	16.895.485	0	100
Beban Langganan Air	1.870.350,00	0	100
Beban Jasa Profesi	3.600.000,00	0	100
Jumlah Belanja Kotor	64.242.574,00	0	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	64.242.574,00	0	100

Terjadi kenaikan beban barang dan jasa sebesar 100 persen per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa disebabkan karena Bawaslu Kota Batam menjadi Satker Baru dan Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya.

Terdapat selisih beban Barang dan Jasa antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp5.006.142,00 merupakan Tunggakan Tagihan bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026 dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 27
Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal SPM
1	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik	522111	3.010.692,00
2	Pembayaran Belanja Tagihan Internet	522112	1.687.600,00
3	Pembayaran Belanja Tagihan Air	522113	307.850,00
Total			5.006.142,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Belanja Barang Operasional (LRA)	Rp	32.018.138,00
- Belanja Barang Non Operasional (LRA)	Rp	8.171.000,00
- Belanja Jasa (LRA)	Rp	19.047.293,00
- Belanja yang masih harus dibayar	Rp	5.006.142,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	64.242.573,00
Mutasi Kurang:		
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025	Rp	64.242.573,00

Mutasi tambah berupa Belanja Barang yang masih harus dibayar 31 Desember 2025 sebesar Rp64.242.573,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28
Rincian Mutasi Tambah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

No	Uraian	2025 (Rp)
1	Beban Keperluan Perkantoran	32.018.138,00
2	Beban Bahan	8.171.000,00
3	Beban Langganan Listrik	13.884.793,00
4	Beban Langganan Air	1.562.500,00

5	Beban Jasa Profesi	3.600.000,00
6	Belanja yang masih harus dibayar	5.006.142,00
7	Jumlah Belanja Kotor	64.242.574,00
8	Pengembalian Belanja	0
	Total	64.242.574,00

D.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.246.944,00 dan Rp0,00.

Tabel 29
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.246.944,00	0,00	100
Total	50.246.944,00	0,00	100

Terjadi kenaikan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar 100 persen dibandingkan pada 31 Desember 2024 hal ini dikarenakan kebutuhan untuk perawatan dan pergantian sparepart kendaraan dinas yang kondisinya sudah usang dan rusak serta Perawatan Inventaris Peralatan Perkantoran.

Tidak terdapat selisih beban Pemeliharaan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	50.246.944,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	50.246.944,00
Mutasi Kurang:	Rp	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025	Rp	50.246.944,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp320.623.216,00 dan Rp0,00.

Tabel 30
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	157.017.058,00	0	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.365.000,00	0	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133.241.158,00	0	100
Jumlah Bruto	320.623.216,00	0	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	320.623.216,00	0	100

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada periode yang sama tahun 2024. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas dikarenakan melaksanakan Uji Petik Pemilih Berkelanjutan (PPBD) Triwulan II, Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol, Memenuhi Undangan Kegiatan dari Bawaslu RI.

Tidak terdapat selisih beban Perjalanan Dinas antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Belanja Perjalanan Biasa	Rp	157.017.058,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	30.365.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	133.241.158,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	320.623.216,00
Mutasi Kurang:		
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	Rp	320.623.216,00

Mutasi tambah berupa Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp320.623.216,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
524111	Belanja Perjalanan Biasa	157.017.058,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.365.000,00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133.241.158,00
Total		320.623.216,00

D. 5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp210.094.092,00 dan Rp0,00.

Tabel 32
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	210.094.092,00	0	100
Total	210.094.092,00	0	100

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024 dikarenakan Bawaslu Kota Batam Pecah DIPA pada bulan Oktober 2025 dan transaksi TKTM dari Provinsi dilakukan pada bulan November 2025.

D. 6 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp656.874.529,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp657.290.908,00 dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.915.771.291,00 dan Rp0,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 33
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.044.936.591,00	0
Pengesahan Hibah Langsung	1.826.400.000,00	0
Transfer Masuk	44.434.700,00	0
Jumlah	2.915.771.291,00	0

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp1.044.936.591,00 merupakan Belanja yang terdiri dari:

Tabel 34
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Akun	Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
512211	Belanja Uang Lembur	5.447.000,00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	32.018.138,00
521211	Belanja Bahan	8.171.000,00
522111	Belanja Langganan Listrik	13.884.793,00
522113	Belanja Langganan Air	1.562.500,00
522151	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.246.944,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	157.017.058,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.365.000,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133.241.158,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.383.000,00
Total		1.044.936.591,00

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp1.826.400.000,00 terdiri dari :

Tabel 35
Rincian Sumber Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

No	Uraian	Satker	Kas Lain di Kementerian Negara / Lembaga Dari Hibah
1	Mobil Avanza Veloz	Set. Bawaslu Kota Batam	1.826.400.000,00
JUMLAH			1.826.400.000,00

Tranfer Masuk sebesar Rp44.434.700 merupakan BMN dari Bawaslu Provinsi.

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.258.480.383,00 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 36
Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Saldo Awal	0	0
Surplus/Defisit LO	(657.290.908,00)	0
Koreksi atas Reklasifikasi	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0
Koreksi Lain-lain	0	0
Transaksi Antar Entitas	2.915.771.291,00	0
Ekuitas Akhir	2.258.480.383,00	0

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.258.480.383,00 dan Rp0,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp2.258.480.383,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

Berikut dibawah Struktur Organisasi di Bawaslu terbaru berdasarkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam :

a. Sekretariat Bawaslu Kota Batam terdiri atas:

- 1) Kepala Sekretariat : **Esther Irianti Lombogia, S.T, M.E**
- 2) Plt.Kepala Sub Bagian Administrasi : **Novelysa EH Samosir, S.Si**
- 3) Plt.Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat : **Rika Purnama Lubis, S.IP**
- 4) Plt.Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum : **Sahat F Rivi Lumban Toruan, S.H**
- 5) Bendahara Pengeluaran : **Novelysa E H Samosir, S.Si**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

Tabel 34
Jabatan Fungsional di Sekretariat Bawaslu Kota Batam

No.	Nama Pegawai	Jabatan Fungsional	SK Pelantikan
1	Vivi susanti, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	150/KP.04/SJ/04/2023 Tanggal 14 April 2023

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Kota Batam sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1 rekening, yang terdiri dari Rekening Virtual Pengeluaran.

Tabel 35
Rincian Rekening Virtual

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening
1	BPP 137 BWS KOTA BATAM	PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk	652296861151000

2. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 6574.1/KU.01.00/K1/06/2025 Tanggal 13 Juni 2025 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam Nomor: 6/KU.00/KR-07/07/2025 Tanggal 02 Juli 2025 Tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 36
Pejabat Perbendaharaan

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Rika Purnama Lubis, S.IP	Penandatangan SPM
4	Novelysa EH Samosir, S.Si	Bendahara Pengeluaran

F.3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Kota Batam s.d 30 November 2025 menunjukkan permasalahan pada Sistem Pengendalian Internal diantaranya :

1. Penatausahaan BMN pada Bawaslu Kota Batam belum tertib kondisi seperti BMN yang belum dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), terdapat BMN yang belum ditemukan, pencatatan Kondisi BMN belum sesuai dengan Kondisi sebenarnya, Aset Kendaraan belum didukung dengan bukti kepemilikan untuk itu telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan inventarisasi ulang terhadap semua BMN.
2. Perhitungan Tunjangan Kinerja pada Bawaslu Kota Batam tidak sesuai Ketentuan Kondisi seperti Pelaksanaan fleksibilitas Lokasi kerja tidak sesuai ketentuan, perhitungan tunjangan kinerja tidak sesuai juknis. Untuk perhitungan Tunjangan Kinerja sudah disesuaikan dengan ketentuan Kondisi dan Juknis.

F.4 PIPK

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- b. Kas Lainnya di KL dari Hibah;
- c. Beban Perjalanan Dinas;
- d. Peralatan dan Mesin;
- e. Tanah.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi, oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan. berdasarkan penilaian tersebut, Satuan Kerja Bawaslu Kota Batam telah mengimplementasikan PIPK tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Berdasarkan PMK 17/PMK.09/2019 Bawaslu Kota Batam telah melakukan penilaian PIPK pada Semester II Tahun 2025 dengan hasil Efektif . Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas laporan keuangan adalah memadai.

F.5 Hibah

Telah dilakukan Register Hibah dan Pengesahan Hibah langsung barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.826.400.000,00 dengan Nomor

F.6 PSP

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 246/PL.09/K1/07/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam belum melakukan PSP pada BMN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian PSP BMN Bawaslu Kota Batam

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lap Top Asus VivoBook Core i7	12 Unit	226.800.000,00
2	Lap Top Asus VivoBook Core i5	2 Unit	26.000.000,00
3	Camera Digital	1 Unit	58.000.000,00
4	View Board	1 Unit	170.000.000,00
5	Video Conference Aver	1 Unit	19.500.000,00
6	Sound System	1 Set	85.000.000,00
7	Printer	5 Unit	18.500.000,00
8	Lemari Besi	2 Unit	3.000.000,00
9	Mesin Finger Print	1 Unit	2.583.000,00
JUMLAH		26	609.383.000,00

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 686115

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl. Cetak 30/04/2026 10:10 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686115) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,029,754,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	759,630,392
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	6,637,083
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	5,006,142
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,044,936,591
0.0	313221	Transfer Masuk	0	44,434,700
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,826,400,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,554,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	242	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	555,420	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	111,084	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	416,137	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	5,447,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	33,705,738	0
3.0	521211	Beban Bahan	8,171,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	16,895,485	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,870,350	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50,246,944	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	157,017,058	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,365,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133,241,158	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	210,094,092	0
JUMLAH			3,687,044,908	3,687,044,908

Keterangan :

FINAL

Batam, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA

197611102008032000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686115) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,044,936,591
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	5,447,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	32,018,138	0
3.0	521211	Belanja Bahan	8,171,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	13,884,793	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,562,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50,246,944	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	157,017,058	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,365,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133,241,158	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609,383,000	0
JUMLAH			1,044,936,591	1,044,936,591

Keterangan :

FINAL

Batam, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA

197611102008032000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM 686115

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:00 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,076,088,000	1,044,936,591	(31,151,409)	97	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	16,764,000	5,447,000	(11,317,000)	32	0	0	0	0
2. Belanja Barang	447,324,000	430,106,591	(17,217,409)	96	0	0	0	0
3. Belanja Modal	612,000,000	609,383,000	(2,617,000)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM 686115

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:00 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,076,088,000	1,044,936,591	(31,151,409)	97	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Batam, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA
197611102008032000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 686115
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 10:03 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	16,764,000	16,764,000	5,447,000	0	5,447,000	32.49	11,317,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	16,764,000	16,764,000	5,447,000	0	5,447,000	32.49	11,317,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	16,764,000	16,764,000	5,447,000	0	5,447,000	32.49	11,317,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	36,534,000	36,444,000	32,018,138	0	32,018,138	87.86	4,425,862
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	36,534,000	36,444,000	32,018,138	0	32,018,138	87.86	4,425,862
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	9,820,000	9,030,000	8,171,000	0	8,171,000	90.49	859,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,820,000	9,030,000	8,171,000	0	8,171,000	90.49	859,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	21,000,000	13,950,000	13,884,793	0	13,884,793	99.53	65,207
522113	Belanja Langganan Air	2,000,000	2,000,000	1,562,500	0	1,562,500	78.12	437,500
522151	Belanja Jasa Profesi	4,500,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	27,500,000	19,550,000	19,047,293	0	19,047,293	97.43	502,707
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,580,000	55,720,000	50,246,944	0	50,246,944	90.18	5,473,056
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	48,580,000	55,720,000	50,246,944	0	50,246,944	90.18	5,473,056
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	157,070,000	157,017,058	0	157,017,058	99.97	52,942
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,000,000	30,490,000	30,365,000	0	30,365,000	99.59	125,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	97,480,000	139,020,000	133,241,158	0	133,241,158	95.84	5,778,842
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	105,480,000	326,580,000	320,623,216	0	320,623,216	98.18	5,956,784
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	227,914,000	447,324,000	430,106,591	0	430,106,591	96.15	17,217,409
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	612,000,000	609,383,000	0	609,383,000	99.57	2,617,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	612,000,000	609,383,000	0	609,383,000	99.57	2,617,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	612,000,000	609,383,000	0	609,383,000	99.57	2,617,000
	JUMLAH BELANJA	244,678,000	1,076,088,000	1,044,936,591	0	1,044,936,591	97.11	31,151,409

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686115) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:01 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,029,754,000	0	3,029,754,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(759,630,392)	0	(759,630,392)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	2,270,123,608	0	2,270,123,608	
JUMLAH ASET	2,270,123,608	0	2,270,123,608	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	11,643,225	0	11,643,225	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11,643,225	0	11,643,225	
JUMLAH KEWAJIBAN	11,643,225	0	11,643,225	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,258,480,383	0	2,258,480,383	0.00
JUMLAH EKUITAS	2,258,480,383	0	2,258,480,383	
JUMLAH EKUITAS	2,258,480,383	0	2,258,480,383	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,270,123,608	0	2,270,123,608	

Keterangan :

FINAL

Batam, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA
197611102008032000 197611102008032000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686115) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:35 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	12,084,083	0	12,084,083	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	64,242,573	0	64,242,573	
Beban Pemeliharaan	50,246,944	0	50,246,944	
Beban Perjalanan Dinas	320,623,216	0	320,623,216	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (3200) **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : (686115) **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:35 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	210,094,092	0	210,094,092	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	657,290,908	0	657,290,908	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(657,290,908)	0	(657,290,908)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(657,290,908)	0	(657,290,908)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(657,290,908)	0	(657,290,908)	()

Keterangan :
FINAL

Batam, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA
197611102008032000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686115) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:00 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(657,290,908)	0	(657,290,908)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,915,771,291	0	2,915,771,291	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,258,480,383	0	2,258,480,383	0
EKUITAS AKHIR	2,258,480,383	0	2,258,480,383	0

Keterangan :
FINAL

Batam, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA
197611102008032000

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 686115 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tanggal : 06/05/26 10:07 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686115 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:09 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		197	3,029,754,000	0	(759,630,392)	(759,630,392)	2,270,123,608
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	6	1,826,400,000	0	(130,457,142)	(130,457,142)	1,695,942,858
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	9	36,950,000	0	(34,250,000)	(34,250,000)	2,700,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	19	29,750,000	0	(29,750,000)	(29,750,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	4,900,000	0	(4,900,000)	(4,900,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	3	3,000,000	0	(3,000,000)	(3,000,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	14,850,000	0	(14,850,000)	(14,850,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	5,900,000	0	(5,900,000)	(5,900,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	9,533,000	0	(7,208,300)	(7,208,300)	2,324,700
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5,035,000	0	(5,035,000)	(5,035,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	25	55,950,000	0	(55,950,000)	(55,950,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	29	46,300,000	0	(46,300,000)	(46,300,000)	0
3050201005	Sice	Buah	7	44,730,000	0	(44,730,000)	(44,730,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	19,100,000	0	(19,100,000)	(19,100,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	4,900,000	0	(4,900,000)	(4,900,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2,900,000	0	(870,000)	(870,000)	2,030,000
3050204004	A.C. Split	Buah	15	65,308,000	0	(65,308,000)	(65,308,000)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	89,478,000	0	(12,978,000)	(12,978,000)	76,500,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9,300,000	0	(9,300,000)	(9,300,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	63,250,000	0	(11,050,000)	(11,050,000)	52,200,000
3060102165	Camera Conference	Buah	2	20,730,000	0	(2,811,000)	(2,811,000)	17,919,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3,444,000	0	(1,033,200)	(1,033,200)	2,410,800
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2,676,000	0	(2,676,000)	(2,676,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	10	62,469,000	0	(62,469,000)	(62,469,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	27	348,624,000	0	(108,799,000)	(108,799,000)	239,825,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	53,837,000	0	(24,962,000)	(24,962,000)	28,875,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	25,020,000	0	(24,373,750)	(24,373,750)	646,250
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	5,420,000	0	(5,420,000)	(5,420,000)	0
3100203018	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board	Buah	1	170,000,000	0	(21,250,000)	(21,250,000)	148,750,000
JUMLAH			197	3,029,754,000	0	(759,630,392)	(759,630,392)	2,270,123,608

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 686115 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

Tgl.Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 06/05/26 10:08 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
132111	Peralatan dan Mesin	3,029,754,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(759,630,392)
J U M L A H		2,270,123,608

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686115 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:09 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		52	31,315,000	0	(31,315,000)	(31,315,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	590,000	0	(590,000)	(590,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	48	27,840,000	0	(27,840,000)	(27,840,000)	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	1	995,000	0	(995,000)	(995,000)	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	1,890,000	0	(1,890,000)	(1,890,000)	0
JUMLAH			52	31,315,000	0	(31,315,000)	(31,315,000)	0

USULAN JURNAL PENYESUAIAN SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN ASERSI
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (LKKL) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)

Kode Satker : 686115

Nama Satker : Sekretariat Bawaslu Kota Batam

No	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah	
			Debit	Kredit
1.	NIHIL			

Penanggungjawab,
Kuasa Pengguna Anggaran



ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, S.T.,M.E
NIP. 19761110 200803 2 001

Penyusun Laporan Keuangan



MUTIARA SELLYNA, S.E
NIP. 19900615 202321 2 050



DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	CQ	5245	BIC	001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,690,000	1,690,000	N	1	laporan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
2	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	CQ	7014	QIC	002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	11,180,000	11,049,000	N	1	Laporan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
3	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6850	EBA	962	Layanan Umum	318,490,000	312,603,216	N	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
4	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6850	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	400,000	396,000	N	1	Laporan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Minimize	Stabilized	1	1	100
5	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6849	EBA	994	Layanan Perkantoran	124,878,000	103,159,375	N	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	1	1	100
6	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6849	EBB	951	Layanan Sarana Internal	612,000,000	609,383,000	N	21	Unit	21	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	21	21	100
7	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6850	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	2,380,000	1,657,000	N	25	Orang	25	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	25	25	100
8	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6849	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,690,000	1,689,000	N	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
9	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6849	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	1,690,000	1,620,000	N	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
10	686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	137	12	WA	6849	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,690,000	1,690,000	N	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
Total Nilai																							1,000.00		
Jumlah Output																							10		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KPPN BATAM

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 686115 - SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-10

Tgl Cetak : 20/02/26 2:33

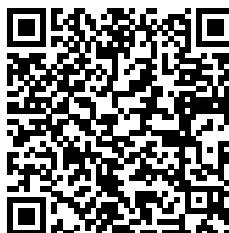
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	244,678,000	244,678,000	0
2	Belanja	0	0	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	24,000,000	24,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	24,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 November 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KPPN BATAM

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 686115 - SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-10

Tgl Cetak : 20/02/26 2:33

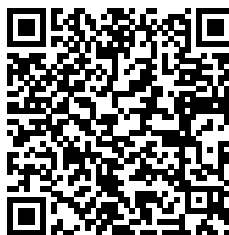
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	244,678,000	244,678,000	0
2	Belanja	0	0	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	24,000,000	24,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	24,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 November 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KPPN BATAM

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 686115 - SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 20/02/26 2:27

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,076,088,000	1,076,088,000	0
2	Belanja	1,044,936,591	1,044,936,591	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	1,826,400,000	1,826,400,000	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026



Batam, 25 November 2025

No : 04/Interim.Bawaslu/KSTII/11/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Catatan Pemeriksaan

Kepada Yth.
**Kepala Sekretariat Bawaslu Kota
Batam**
di
Batam

Dengan hormat,

Sebagai bagian dari Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun 2025 pada satuan kerja Bawaslu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Tugas Anggota I BPK Nomor Surat Tugas 163/T/ST/Anggota-I/PPN.01/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dan tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh instansi yang ibu pimpin terkait proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Catatan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 pada satker Bawaslu Kota Batam.

Selanjutnya, kami mengharapkan tanggapan dari ibu atas catatan tersebut paling lambat hari Jumat tanggal 28 November 2025 dengan menggunakan format seperti pada lampiran. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Diterima Oleh,
Kepala Sekretariat Bawaslu
Kota Batam**



Esther Irianti Lombogia

**Diserahkan Oleh,
Ketua Subtim II**



Nazaret Stefanus

DAFTAR ISI
CATATAN PERMASALAHAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN BAWASLU TAHUN 2025
PADA
BAWASLU KOTA BATAM

I. Sistem Pengendalian Internal

1. Penatausahaan BMN pada Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Belum Tertib;
2. Perhitungan Tunjangan Kinerja pada Bawaslu Kota Batam Tidak Sesuai Ketentuan.

II. Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan

-

**CATATAN PERMASALAHAN HASIL PEMERIKSAAN INTERIM
ATAS LAPORAN KEUANGAN BAWASLU TAHUN 2025
PADA
BAWASLU KOTA BATAM**

Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Bawaslu Kota Batam tersebut s.d. 30 November 2025 menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

I. Sistem Pengendalian Internal

1. Penatausahaan BMN pada Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Belum Tertib

Kondisi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam dalam Neraca per 31 Oktober 2025 (unaudited) menyajikan saldo aset tetap senilai Rp39.359.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tetap Bawaslu Kota Batam per 31 Oktober 2025

Kode	Uraian	Nilai (Rp)
132111	Peralatan dan Mesin	587.627.000,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(548.267.500,00)
	Jumlah	39.359.500,00

Sumber: Laporan BMN Bawaslu Kota Batam

Berdasarkan hasil reviu dokumen laporan serta pemeriksaan fisik BMN Bawaslu Kota Batam diketahui bahwa terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- a. BMN pada Bawaslu Kota Batam Belum Dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2025, Bawaslu Kota Batam merupakan satuan kerja yang baru ditambahkan. Sebelum menjadi satuan kerja sendiri BMN pada Bawaslu Kota Batam merupakan bagian dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Atas perubahan menjadi satker baru tersebut telah dilakukan transfer BMN dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada Bawaslu Kota Batam sesuai dengan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 22/PL.09/KR.06/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025. Berdasarkan berita acara tersebut terdapat 212 BMN senilai Rp624.399.500,00 yang ditransfer dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada Bawaslu Kota Batam. Hasil pemeriksaan atas pencatatan BMN pada SIMAN menunjukan bahwa atas BMN tersebut telah dikeluarkan dari pencatatan BMN pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau namun belum dilakukan pencatatan pada SIMAN oleh Bawaslu Kota Batam.

- b. Terdapat BMN yang Belum Ditemukan

Bawaslu Kota Batam telah melakukan inventarisasi atas BMN yang diserahkan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut masih terdapat BMN yang belum dapat ditemukan sebanyak 29 barang senilai Rp63.490.000,00. (lebih rinci pada lampiran)

- c. Pencatatan Kondisi BMN Belum Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Batam terdapat 86 BMN senilai Rp310.610.00,00 yang dicatat dalam kondisi rusak berat (lebih rinci pada lampiran). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara sampel atas BMN tersebut menunjukkan bahwa atas BMN tersebut masih digunakan dan tidak dalam kondisi rusak berat.

d. Aset Kendaraan Belum Didukung dengan Bukti Kepemilikan

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batam dengan Badan Pengawas Pemilu tentang Pemberian Hibah Barang kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Nomor: 200.1.1/02/IX/2025 – 001/KU.00/KR-07/09/2025 tanggal 26 September 2025, Bawaslu Kota Batam menerima hibah enam unit mobil senilai Rp1.826.400.000,00 dari Pemerintah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Kendaraan Hibah Pemerintah Kota Batam kepada Bawaslu Kota Batam

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	STNK	BPKB
1.	Alat Angkutan Bermotor	BP 1506 C	Toyona Avanza	Ada	Belum Ada
2.	Alat Angkutan Bermotor	BP 1504 C	Toyona Avanza	Ada	Belum Ada
3.	Alat Angkutan Bermotor	BP 1503 C	Toyona Avanza	Ada	Belum Ada
4.	Alat Angkutan Bermotor	BP 1502 C	Toyona Avanza	Ada	Belum Ada
5.	Alat Angkutan Bermotor	BP 1497 C	Toyona Avanza	Ada	Belum Ada
6.	Alat Angkutan Bermotor	BP 1495 C	Toyona Avanza	Ada	Belum Ada

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen kendaraan tersebut menunjukkan bahwa atas enam kendaraan tersebut belum didukung dengan dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pada:
 - 1) Pasal 6 ayat (2) huruf l yang menyatakan bahwa, “Pegguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik negara yang berada dalam penguasaannya”;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya”;
 - 3) Pasal 7 ayat (2) huruf c dan d yang menyatakan bahwa, “Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, dan d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya”;
 - 4) Pasal 42 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau KPB wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; pengamanan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;

- 5) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN;
 - 2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan BMN dengan menggunakan SIMAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dilakukan oleh pengguna SIMAN (*user*) terdokumentasi dan dapat ditelusuri.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada:
 - 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa ruang lingkup Penatausahaan BMN meliputi: a) Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; b) Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan c) Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan;
 - 2) Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang wajib melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
 - 3) Pasal 42 Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/KPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan, selanjutnya: a) direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat; b) tidak disajikan dalam neraca; c) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Akibat

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pencatatan BMN belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- b. Potensi kehilangan atas BMN yang belum dicatat dan tidak ditemukan.

Sebab

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Pengurus BMN Bawaslu Kota Batam belum cermat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penatausahaan BMN.

Tanggapan Instansi

(Terlampir)

2. Perhitungan Tunjangan Kinerja pada Bawaslu Kota Batam Tidak Sesuai Ketentuan Kondisi

Tunjangan kinerja (tukin) adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai. Besaran tukin dihitung sesuai kelas jabatan dan diukur berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja pegawai. Besaran tukin juga dipengaruhi oleh faktor pengurang seperti keterlambatan, pulang sebelum waktunya (PSW), lupa/lalai tidak mengisi daftar hadir elektronik, meninggalkan kantor tanpa izin, tidak hadir atau tanpa keterangan, hukuman disiplin, dan diberhentikan sementara dari jabatan fungsional tertentu.

Bawaslu Kota Batam TA 2025 mencatat kehadiran seluruh pegawai dengan menggunakan aplikasi/sistem alat presensi elektronik untuk kemudian disampaikan ke Bawaslu Prov. Kepulauan Riau sebagai dasar perhitungan tukin. Pemeriksaan terhadap daftar kehadiran seluruh pegawai Bawaslu mulai Januari sd. Oktober 2025 diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan fleksibilitas lokasi kerja tidak sesuai ketentuan

Fleksibilitas kerja adalah metode kerja yang diterapkan dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Fleksibilitas secara lokasi atau *Work From Anywhere* (WFA) dapat diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik tugas kedinasan dan/atau keadaan khusus pegawai, serta dapat dilaksanakan paling banyak dua hari kerja dalam satu minggu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas daftar presensi pegawai Bawaslu Kota Batam diketahui masih terdapat WFA yang dilaksanakan lebih dari dua hari kerja dalam satu minggu.

b. Perhitungan tunjangan kinerja tidak sesuai dengan juknis

Bawaslu RI menetapkan petunjuk teknis (juknis) tukin yang menjadi acuan perhitungan penentuan besaran tukin di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan satker Bawaslu. Pemeriksaan terhadap daftar presensi pegawai, nominatif tukin, dan dokumen pembayaran tukin pegawai Bawaslu Kota Batam diketahui bahwa perhitungan tukin belum dilakukan sesuai jumlah dan jam kehadiran riil pegawai. Perhitungan tukin belum dilakukan pengurangan nilai tukin sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, pasal 13 ayat (1), menyatakan bahwa Fleksibilitas secara Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

dapat dilaksanakan Pegawai ASN paling banyak 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan

- b. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0001.B/BAWASLU/SJ/KU.00.02/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, pada BAB II.B.:
- 1) Angka 1 huruf e, yang menyatakan bahwa Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan oleh tunjangan kehadiran dan tunjangan prestasi kerja; dan
 - 2) Angka 2, yang menyatakan bahwa besaran tunjangan kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diukur dengan 2 (dua) unsur, meliputi penilaian prestasi kerja dan kehadiran pegawai.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran Tunjangan Kinerja belum sesuai dengan nilai seharusnya.

Sebab

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bawaslu Kota Batam belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya; dan
- b. Kasubag Administrasi belum optimal dalam perhitungan tunjangan kinerja pegawai di lingkungannya.

Komentar Instansi

(Terlampir)

Rincian Aset Tetap yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merk/Type	Kuantitas	Harga Satuan Barang	Harga Barang (RP)
1	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	2019	9	Meja Receptionist Batam	1	4.900.000	4.900.000
2	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020	87	Meja Staf Batam	1	1.200.000	1.200.000
3	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	70	ASUS	1	6.850.000	6.850.000
4	3.05.01.04.007	Brandkas	2019	7	KRISBOW	1	4.900.000	4.900.000
5	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	87	Epson	1	2.400.000	2.400.000
6	3.05.02.01.005	Sice	2018	9	SOFA	1	7.415.000	7.415.000
7	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	80	Meja Kasubbag	1	5.500.000	5.500.000
8	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2019	59	Super Furniture 2 Pintu	1	1.250.000	1.250.000
9	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	2019	8	HI LOOK	1	14.850.000	14.850.000
10	3.10.01.02.001	P.C Unit	2019	87	ASUS	1	6.400.000	6.400.000
11	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020	252	Meja Staf Batam	1	1.200.000	1.200.000
12	3.06.01.01.088	Voice Recorder	2020	7	Sony	1	945.000	945.000
13	3.06.01.01.088	Voice Recorder	2020	8	Sony	1	945.000	945.000
14	3.06.01.02.128	Camera Digital	2018	5	Camera Canon EOS 3000D with kit18-55	1	5.250.000	5.250.000
15	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer) External/ Portable Hardisk	2018	33	Laserjet HP Pro M12 w	1	1.665.000	1.665.000
16	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	89	Epson	1	2.200.000	2.200.000
17	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2020	41	Lemari Arsip	1	4.850.000	4.850.000
18	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	32	LG Dual Inverter 0.5 PK R32 T06EV4 Unit Only	1	3.802.000	3.802.000
19	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	76	Meja Sidang Hakim	1	8.500.000	8.500.000
20	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	77	Meja Sidang Jaksa	1	4.250.000	4.250.000
21	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	78	Meja Sidang Pengacara	1	4.250.000	4.250.000
22	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	79	Meja Sidang Notulen	1	1.200.000	1.200.000
23	3.05.02.01.005	Sice	2018	87	Sofa	1	7.415.000	7.415.000
24	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2018	4	Layar tripod letaec 70 Inch	1	590.000	590.000
25	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	2018	1	Mic wireless Sennheiser SKM 9004 U - Multi Channel	1	3.350.000	3.350.000
26	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	2018	12	Mic wireless Sennheiser SKM 9004 U - Multi Channel	1	3.350.000	3.350.000
27	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2018	5	PROJECTOR INFOCUS IN 112XV	1	5.035.000	5.035.000
28	3.05.02.06.008	Sound System	2018	4	Speaker baretone max 15mb 15 inch oryiginal max 15 mb	1	4.478.000	4.478.000
29	3.05.02.04.004	A.C. Split	2019	89	Sharp 1 PK	1	3.950.000	3.950.000
30	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2019	203	Orbitrend	1	1.200.000	1.200.000
31	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2019	204	Orbitrend	1	1.200.000	1.200.000
32	3.05.02.01.008	Meja Rapat	2019	20	Meja Rapat Batam	1	14.900.000	14.900.000
33	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	539	Kursi Rapat Batam	1	1.200.000	1.200.000
34	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	541	Kursi Rapat Batam	1	1.200.000	1.200.000
35	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020	253	Meja Staf Batam	1	1.200.000	1.200.000
36	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2020	43	Lemari Arsip	1	4.850.000	4.850.000
37	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2020	37	Lemari Arsip	1	4.850.000	4.850.000
38	3.06.01.01.037	Microphone/Boom Stand	2020	3	Stand Mic Targa MSA-719	1	995.000	995.000
39	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	110	EPSON	1	2.400.000	2.400.000
40	3.10.01.02.002	Lap Top	2020	78	ASUS A412UA	1	5.000.000	5.000.000
41	3.10.01.02.001	PC	2019	80	Asus	1		
42	3.10.01.02.002	Lap Top	2018	12	Dell Inspiron 5378 Gray - Core i3-7100U-4GB-1T	1	8.662.000	8.662.000
43	3.10.01.02.002	Lap Top	2018	13	Dell Inspiron 5378 Gray - Core i3-7100U-4GB-1T	1	8.662.000	8.662.000
44	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	87	Lenovo AIO 330-20IGM-F0D7000KID-Win 10 home	1	4.869.000	4.869.000
45	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	32	Printer Epson L310	1	1.986.000	1.986.000
46	3.10.01.02.001	P.C Unit	2019	85	Asus	1	6.400.000	6.400.000
47	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	66	Asus	1	6.850.000	6.850.000
48	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	88	Epson	1	2.200.000	2.200.000
49	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	90	Epson	1	2.200.000	2.200.000
50	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2019	62	Super Funiture 2 Pintu	1	1.250.000	1.250.000
51	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2019	66	Super Funiture 2 Pintu	1	1.250.000	1.250.000
52	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2019	68	Super Funiture 2 Pintu	1	1.250.000	1.250.000
53	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2019	69	Super Funiture 2 Pintu	1	1.250.000	1.250.000
54	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	112	Epson	1	2.400.000	2.400.000
55	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	31	Printer Epson L310	1	1.986.000	1.986.000

[illegible]

KOP SURAT INSTANSI

Judul Temuan:
.....

Komentar Instansi:
.....
.....
.....
.....
.....

Kepala Sekretariat Bawaslu.....

Ttd dan cap dinas

.....

REKAPITULASI HIBAH BARANG BAWASLU KOTA BATAM
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 686115
NAMA SATKER : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

No	Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nomor Register	Pendonor	No. NPHD	Tgl. NPHD	Nilai NPHD	No. BAST	Tgl. BAST	Nilai BAST	No. MPHLBJS	Tgl. MPHLBJS	No. Persetujuan MPHLBJS	Tgl. Persetujuan MPHLBJS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Bawaslu Kota Batam	2LS9LS1A	Pemerintah Kota Batam	200.1.1/02/ IX/2025	26 September 2025	1.826.400.000,00	200.1.1/02/BAST/ X/2025	17 Oktober 2025	1.826.400.000,00	00020T	31 Desember 2025	'8285213881057180290	31 Desember 2025
JUMLAH													

Batam, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kota Batam



ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, ST., ME
NIP. 19761110 200803 2 001

**DAFTAR UTANG PIHAK KETIGA/TUNGGAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE SATKER : 686115

NAMA SATKER : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

No	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Kontrak / Tagihan		Sumber Dana	Jumlah
					Nomor	Tgl		
1	PLN	522111	TAGIHAN LISTRIK DESEMBER	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	3.010.692
2	INDIHOME	521111	TAGIHAN INTERNET DESEMBER	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	1.687.600
3	PDAM	522113	TAGIHAN AIR DESEMBER	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	307.850
4	Kekurangan Gaji Pokok	511111	TAGIHAN KEKURANGAN GAJI PNS	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 JULI 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	5.554.200
5	Kekurangan Tunj Istri/Suami	511121	TAGIHAN KEKURANGAN GAJI PNS	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 JULI 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	555.420
6	Kekurangan Tunj Anak	511122	TAGIHAN KEKURANGAN GAJI PNS	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 JULI 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	111.084
7	Kekurangan Tunj Pajak	511125	TAGIHAN KEKURANGAN GAJI PNS	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 JULI 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	416.137
8	Kekurangan Pembulatan	511119	TAGIHAN KEKURANGAN GAJI PNS	DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2026	1 JULI 2025	31 DESEMBER 2025	APBN	242
JUMLAH								11.643.225

Batam, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kota Batam



ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, ST., ME

NIP. 19761110 200803 2 001

MONITORING POSISI KAS (RUPIAH MURNI)
PER 31 Desember 2025

KODE SATKER : 686115
NAMA SATKER : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM

No	BP/BPP	Saldo Rek Koran Bank (RM) 31 Desember 2025	Uang Tunai di Brankas 31 Desember 2025	Uang di BPP 31 Desember 2025	Jumlah Kas di BP/BPP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor			
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13
1	BP Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Form diisi dan lengkapi dengan dokumen
NB. pendukung (rek koran, BA Pemeriksaan
Kas dll)

Batam, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran



Novelysa E H Samosir, S.si
NIP. 19900107 202203 2 001

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2025 AUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (686115) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM
Kode dan Nama UAPPAW : (3200) KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Eselon 1 : (01501) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kode dan Nama K/L : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua!	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak

2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBP		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
			✓	
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak

11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	✓		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		✓	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		✓	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		✓	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		✓	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		✓	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	✓		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	✓		Tidak
3	Apakah formula perhitungn SAL pada LPSAL telah sesuai?	✓		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	✓		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	✓		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	✓		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	✓		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	✓		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	✓		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	✓		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	✓		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	✓		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	✓		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Mengetahui
Penyusun LKKL,



(Mutiara Sellyna, S.E)
NIP. 19900615 202321 2 050

Batam, 31 Desember 2025
Penelaah,



(Novelysa EH Samosir, S.Si)
NIP. 19900107 202203 2 001

